

**ANALISIS STATUS GIZI ANAK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI
KOTA MEDAN (STUDI KASUS RUMAH TANGGA KONSUMSI
ROKOK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama : Yuna Hasanah Berasa
NPM : 1505180028
Program studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : YUNA HASANAH BERASA
NPM : 1505180028
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS STATUS GIZI ANAK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS RUMAH TANGGA KONSUMSI ROKOK)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Penguji II



(MUKMIN POHAN, SE, M.Si)

Pembimbing



(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

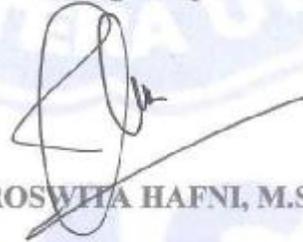
Skripsi ini disusun oleh :

Nama : YUNA HASANAH BERASA
N.P.M : 1505180028
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS STATUS GIZI ANAK PADA RUMAH
TANGGA MISKIN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS
RUMAH TANGGA KONSUMSI ROKOK)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YUNA HASANAH BERASA
NPM : 1505180028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



YUNA HASANAH BERASA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YUNA HASANAH BERASA
N.P.M : 1505180028
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS STATUS GIZI ANAK PADA RUMAH TANGGA MISKIN
DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS RUMAH TANGGA KONSUMSI
ROKOK)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/2-2019	- Acc proposal seminar di & lanjutkan - Buat rencana kuosimen (terbaca sesuai arahan)	y	
23/2-2019	- Acc kuosimen yg selesai - Penyetoran kuosimen	y	
1/3-2019	- Pengumpulan kuosimen - Pengumpulan kuosimen dengan excel untuk semua atas pertanyaannya - Berdiskusi sesuai arahan	y	
16/3-2019	- Distribusikan semua atas pertanyaan beserta akor - Selesai paraf dll. (terbaca)	y	
14/3-2019	- Bab IV → kelua - Bab V → definisi dan saran - Daftar pustaka & Daftar isi - Abstrak, lampiran, dll	y	
16/3-2019	Acc Skripsi utk sidang akhir Gizi		

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status gizi anak terhadap konsumsi rokok di Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin pengonsumsi rokok di Kota Medan. Sampel yang digunakan berjumlah 80 orang responden. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan cara menyebar kuisisioner kepada responden. Hasil yang di uji dengan menguji secara Deskriptif, maka diperoleh hasil bahwa masih banyak status gizi anak di Medan yang belum sesuai. Dengan menyebar kuisisioner, dapat disimpulkan bahwa status gizi anak pada rumah tangga miskin konsumsi rokok masih sangat buruk. Rumah tangga miskin yang merokok lebih mementingkan pendapatannya untuk membeli rokok bukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Oleh sebab itu, gizi anak masih sangat perlu diperhatikan karena gizi anak berpengaruh terhadap kesehatan anak di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Status Gizi Anak, Rumah Tangga Miskin, Pendapatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Status Gizi Anak Pada Rumah Tangga Miskin di Kota Medan (Studi Kasus Rumah Tangga Pengonsumsi Rokok”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang Insha Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang Tua Tercinta (Sabar Berasa dan Marhayani Berampu S.Pd.I), sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi. Semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang diberikan dan dapat membuat suatu kebanggaan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S, selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Hj Roswita Hafni M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan di akhirat kelak.
7. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam akademik.
8. Keluarga Saya (Seluruh Anggota Keluarga), terima kasih sudah sering membantu penulis dalam segala hal.
9. Untuk orang terkasih (Muhammad Ardiansyah), terima kasih telah banyak membantu dan memberi support dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa, serta suka duka yang telah banyak kita lewati bersama.
10. Teman Seperjuangan saya (Desi Aisyah), (Kak Nurhidayati Tumangger), (Meily Rahmalia), (Nursari Ramadhani), (Riska Rahmadiyah Munthe), (Ewi Mulyani) Terima kasih untuk ketulusan, menemani membantu dan memberi segala masukan serta selalu ada dalam memberi support kepada penulis, selalu menghilangkan kepenatan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.

11. Teman Seperjuangan saya di Perantauan (Vegy Septianingsih), (Pratiwi Nurhayati), (Siska Widya Kusumah), (Hilma Souryani), dan Adik saya sendiri, Terima kasih atas semua bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama berada jauh dari keluarga, semoga sukses selalu menghampiri kita.
12. Teman-teman EP Angkatan 2015 dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, Terima kasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amiin.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkannya. Terima Kasih **J**

Medan, Maret 2019

Penulis

Yuna Hasanah Berasa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	12
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	21
2.1.3 Teori Konsumsi	31
2.1.4 Teori Pendapatan	32
2.1.5 Konsep Pendapatan Nasional	35
2.1.6 Teori Pendapatan Daerah	37
2.1.7 Pendapatan Rumah Tangga.....	38
2.1.8 Pendapatan Perkapita	41
2.2 Regulasi	44
2.2.1 Tinjauan Kebijakan Publik	44
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	46

2.2.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan	47
2.2.4 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	51
2.2.5 Faktor Penyebab Kemiskinan	53
2.3 Penelitian Terdahulu	55
2.4 Kerangka Konseptual	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Pendekatan Penelitian	57
3.2 Definisi Operasional	57
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	58
3.4 Populasi dan Sampel	58
3.4.1 Populasi	58
3.4.2 Sampel.....	58
3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	59
3.6 Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN.....	60
4.1 Gambaran Umum Kota Medan	60
4.1.1 Kondisi Geografis	60
4.1.2 Kondisi Demografis	61
4.1.3 Sarana Pendidikan, Kesehatan, Ibadah, dan Transportasi	62
4.2 Karakteristik Responden	62
4.3 Analisis Penelitian	65
4.3.1 Analisis Deskriptif Tentang Pengeluaran Rokok	65
4.3.2 Analisis Deskriptif Tentang Status Gizi Anak.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konsumsi Rokok di Kota Medan Tahun 2015	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	57
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	58
Tabel 4.1 Usia Responden	63
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	63
Tabel 4.3 Pendidikan Responden.....	64
Tabel 4.4 Pendapatan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Pengeluaran Rokok di Indonesia	3
Gambar 1.2 Persentase Perokok Pada Penduduk di Negara ASEAN	6
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah	23
Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman	25
Gambar 2.3 Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapatan	26
Gambar 2.4 Kurva Bird	27
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual	56
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Medan.....	61
Gambar 4.2 Kebutuhan yang di Keluarkan untuk Rokok	65
Gambar 4.3 Jumlah Rokok yang di Habiskan Perhari.....	66
Gambar 4.4 Biaya Pengeluaran Rokok.....	67
Gambar 4.5 Pengetahuan Masyarakat Tentang Konsumsi Rokok	68
Gambar 4.6 Bahaya Perokok Aktif dan Pasif	69
Gambar 4.7 Merokok di Sekitar Anggota Keluarga	70
Gambar 4.8 Pengetahuan Tentang Bahaya Merokok	71
Gambar 4.9 Jumlah Anak	72
Gambar 4.10 Jumlah Balita	73
Gambar 4.11 Ibu yang Mengetahui Suami Merokok	74
Gambar 4.12 Alasan Ibu Melarang Bapak Merokok	75
Gambar 4.13 Tanggapan Ibu Jika Bapak Merokok di Dalam Rumah	76
Gambar 4.14 Pengeluaran Rokok Jika Ditabung Dapat Menambah Kebutuhan Gizi Anak.....	77
Gambar 4.15 Pengeluaran Rokok Mengurangi Kebutuhan Anak.....	78
Gambar 4.16 Penyebab Asap Rokok	79

Gambar 4.17 Asap Rokok Mempengaruhi Nafsu Makan Anak	80
Gambar 4.18 Perokok Pasif Berdampak Kematian	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan pengembangan yang nyata dan juga penting terhadap ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain menaruh perhatian pada pengalokasian sumber daya secara efisien dan pertumbuhan output secara berkelanjutan, ilmu ekonomi pembangunan juga berfokus pada mekanisme ekonomi, sosial, dan lembaga yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan standar hidup secara cepat dan berskala besar dari kaum miskin di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, ekonomi pembangunan juga harus memberikan perhatian yang besar pada perumusan kebijakan publik yang tepat dan dirancang menghasilkan transformasi ekonomi, lembaga, dan sosial yang berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Alasan inilah yang menyebabkan sektor publik harus memikul peran yang lebih besar dan menentukan dalam ekonomi pembangunan dibandingkan perannya dalam analisis perekonomian neoklasik tradisional. (Todaro, 2011)

Semua analisis yang realistis mengenai permasalahan pembangunan akan mensyaratkan pemakaian variabel-variabel unik perekonomian antara lain tingkat pendapatan, harga, tabungan bersama dengan faktor-faktor kelembagaan non ekonomi yang juga relevan, mencakup rincian mengenai peraturan kepemilikan tanah; pengaruh dan tingkat sosial dan kelas masyarakat; struktur perkreditan, pendidikan dan kesehatan; organisasi dan tujuan dari birokrasi pemerintah; kelengkapan dari administrasi publik, dasar-dasar dari sikap populer terhadap

kerja, waktu luang, dan pengembangan diri; serta nilai, peran, dan sikap dari para pelaku politik dan ekonomi. (Todaro, 2011)

Bicara tentang kemiskinan, kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan atau kemampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan dasar. Berkaitan dengan pendapatan yang rendah, sebagian penduduk yang sangat miskin hidup di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Sebagian kemiskinan terjadi bukan hanya karena rendahnya modal manusia, tetapi juga karena pengucilan sosial dan politik serta pemasangan hak lainnya. Terjadinya kemiskinan sangat bervariasi di seluruh negara berkembang. Terutama di Indonesia khususnya Kota Medan, Sumatera Utara. (Todaro, 2011)

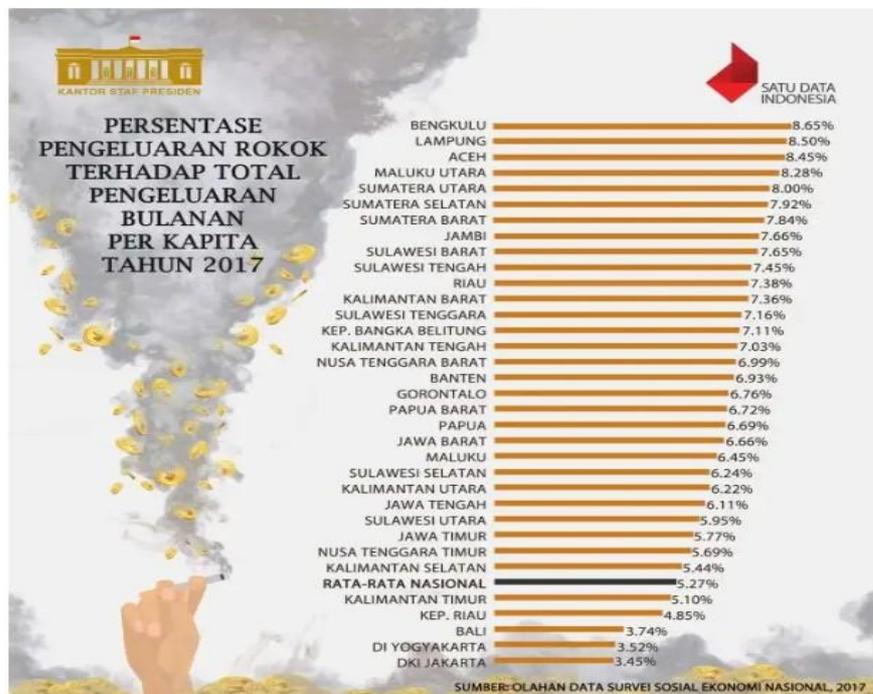
Kemiskinan merupakan kegetiran yang dahsyat dalam kehidupan manusia, sehingga upaya untuk menanggulangnya merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Para ekonom pembangunan juga semakin memfokuskan perhatiannya pada pengaruh kemiskinan dan ketimpangan terhadap pelambanan pertumbuhan. Artinya, kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya merupakan akibat dari pertumbuhan yang keliru tetapi juga dapat menjadi penyebab kekeliruan pertumbuhan itu. Hubungan ini, bersama dengan pengukuran ketimpangan dan kemiskinan serta strategi untuk menanggulangi semua masalah yang ada dalam kemiskinan. (Todaro, 2011)

Akibat miskin, status gizi buruk bertambah tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi rumah tangga menentukan status gizi anggota rumah tangga tersebut, terutama status gizi anak. Kemiskinan

merupakan penyebab kurang gizi yang paling sering dijumpai. Faktor ini harus mendapat perhatian yang serius karena keadaan ekonomi relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan. Masyarakat miskin di negara berkembang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk mengkonsumsi rokok. (www.bps.go.id)

Kebiasaan merokok di Indonesia diperkirakan dimulai pada awal abad ke-19, warisan budaya bangsa Indonesia ialah rokok kretek. Rokok kretek menggunakan tembakau asli yang kemudian dikeringkan, dipadukan dengan cengkeh dan saat dihisap terdengar bunyi seperti kretek (Poetra, 2012). Merokok merupakan kegiatan menghisap tembakau yang dibakar kedalam tubuh dan menghembuskan kembali keluar (Amstrong, 1991).

Gambar 1.1 Persentase Pengeluaran Rokok di Indonesia



Sumber: Olahan Data Survei Ekonomi Nasional, 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Sumatera Utara berada pada urutan ke 5 dalam persentase pengeluaran rokok terbesar di Indonesia. Dapat

dilihat bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya merokok tidak dipedulikan. Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang memiliki persentase pengeluaran rokok tertinggi perkapita setiap bulannya, dan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta. Semetara itu, Sumatera Utara berada pada posisi kelima Tertinggi.

Mengkonsumsi rokok telah menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia khususnya Kota Medan. Berbagai upaya pengendalian konsumsi rokok telah dilakukan secara bertahap dan terintegrasi melibatkan berbagai sektor pemerintahan dan non pemerintahan. Merokok merupakan suatu kebiasaan yang mengganggu dan merugikan kesehatan. Banyak penyakit yang telah terbukti sebagai akibat dari merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan perokok, tetapi juga merugikan orang yang berada di dekatnya. Orang yang tidak merokok tetapi terpaksa menghirup rokok disebut sebagai perokok pasif.

Masalah merokok merupakan isu yang sulit untuk dicapai penyelesaian dan hingga saat ini masih menjadi masalah di kalangan masyarakat. Rokok dibutuhkan oleh sebagian orang, tetapi menyimpan bahaya penderitaan dan kematian jika mengkonsumsinya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa konsumsi rokok ternyata dapat membunuh orang setiap detiknya.

Industri rokok juga menyediakan lapangan pekerjaan yang signifikan. Tidak mengherankan jika penanaman terhadap industri ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Sesungguhnya dampak negatif dari industri rokok sangat dirasakan oleh masyarakat miskin daripada orang kaya. Orang miskin akan jauh lebih rentan terserang penyakit daripada orang kaya. Dan secara tidak sadar, rokok merupakan salah faktor jeratan kemiskinan di Indonesia. Orang miskin dengan

penghasilan kurang dari 1 juta per bulan rela menghabiskan porsi yang besar dari penghasilannya untuk membeli rokok. Tidak sedikit bahkan menghabiskan $\frac{1}{4}$ penghasilannya hanya untuk membeli rokok. Akibatnya, kebutuhan pokok tidak terpenuhi karena uang yang ada digunakan untuk membeli rokok.

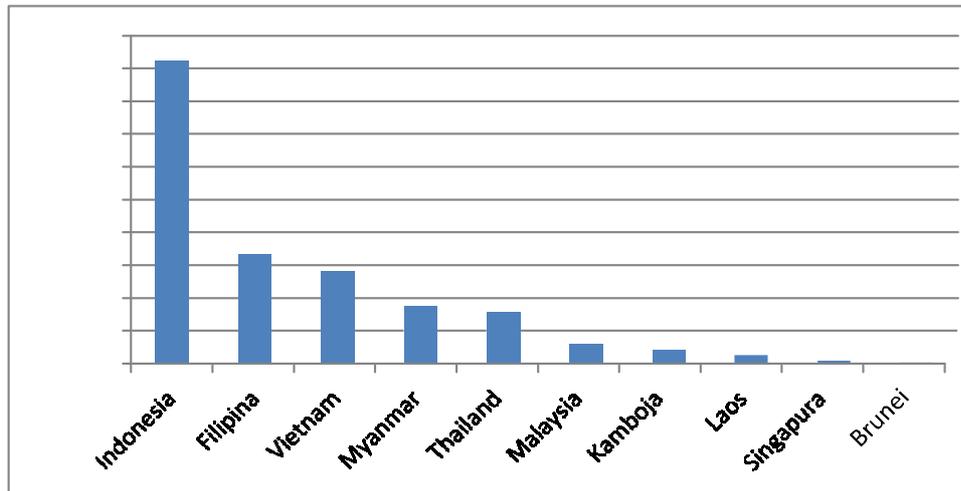
Menurut Sunarno rokok adalah termasuk narkoba jenis zat adiktif, karena seorang perokok biasanya akan mengalami ketagihan. Zat yang terkandung di dalam rokok menjadi penyebab orang merasa ketagihan. Zat tersebut yaitu nikotin. Orang yang merokok seringkali merasa nikmat dan nyaman dan juga dapat meningkatkan produktivitas. Tetapi apabila mereka tidak merokok maka akan merasa lemah, tidak produktif, dan tidak berdaya.

Berdasarkan penelitian Rachiotis, dkk (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi intensitas merokok diantaranya usia yang semakin tua, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan. Jumlah perokok laki-laki di negara berkembang yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah dan penghasilannya tidak mencukupi. Tingkat pendidikan orang tua akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang kesehatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk perilaku merokok dan bahayanya.

Menurut data Departemen Kesehatan RI Tahun 2004, sekitar 70% penduduk Indonesia atau 141,44 juta jiwa adalah perokok aktif dan 60% atau 84,84 juta jiwa dari jumlah itu berasal dari masyarakat dalam kategori ekonomi yang dibawah. Menurut *The Tobacco Atlas 3rd edition* (2009), ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari sepuluh perokok dunia dan 20% penyebab kematian global akibat tembakau. Persentase perokok pada penduduk di

negara ASEAN terbesar di Indonesia (46,16%), Filipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand (7,74%), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%).

Gambar 1.2 Persentase Perokok pada Penduduk di Negara ASEAN



Sumber : The Tobacco Atlas 3rd editon, 2009

Konsumsi rokok di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dari survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Global Youth Tobacco Survey (GYTS), Global Adult Tobacco Survey (GATS), laporan World Health Organizer (WHO) dan Tobacco Atlas. Peningkatan konsumsi rokok di Indonesia disebabkan oleh harga rokok yang murah, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan rumah tangga, proses mekanisme industri rokok, dan perilaku masyarakat.

Rokok merupakan komoditas yang memiliki peranan terbesar kedua setelah besar terhadap garis kemiskinan di Medan selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 terlihat bahwa peranan komoditas beras masih mendominasi baik di wilayah kota maupun desa terhadap garis kemiskinan di Medan. Namun, pada

2017 peranan komoditas beras dan tongkol, tuna, cakalang menurun dan diikuti dengan naiknya peranan kontribusi rokok baik di wilayah kota maupun desa. Tidak hanya itu, dibandingkan tahun 2013, peranan komoditas rokok juga naik signifikan pada wilayah desa dari pada kota pada tahun 2017. Hal ini berarti rumah tangga di desa, yang identik dengan kemiskinan yang lebih tinggi, mengkonsumsi rokok lebih banyak dari pada rumah tangga kota.

Besarnya konsumsi rokok oleh masyarakat cukup mengkhawatirkan terlebih konsumsi rokok dianggap lebih penting daripada konsumsi untuk kebutuhan pokok lainnya yang memiliki nilai gizi lebih tinggi. Uang yang lebih banyak dihabiskan untuk membeli rokok tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti bahan makanan, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Bahkan pada kasus untuk orang miskin, yang mana pendapatannya hanya cukup digunakan untuk membeli makanan, saat ia tetap mengkonsumsi rokok maka pengeluaran untuk rokok tersebut dapat membuat kaum miskin terjebak pada keadaan kekurangan gizi di masa depan (WHO, 2004 dalam Toukan, 2016:61).

Akibat dari persentase pengeluaran untuk konsumsi rokok yang lebih besar daripada untuk kebutuhan lainnya, tidak hanya menyebabkan standar hidup keluarga miskin semakin rendah saja. Kondisi kemiskinan yang identik dengan lingkungan yang kumuh, tekanan hidup yang berat, serta tingkat stres yang lebih tinggi juga dapat mendorong orang untuk mengkonsumsi rokok lebih banyak dan lebih sering.

Tabel 1.1

Konsumsi Rokok di Kota Medan tahun 2015

Jenis Konsumsi	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran (%)
Rokok/ <i>Cigarette</i>	56.787	12,8

Sumber : BPS data diolah (www.bps.go.id)

Status gizi seseorang menjadi indikator yang penting dalam status kesehatannya. Beberapa penyebab yang mengakibatkan status gizi tidak sehat yaitu asupan makanan yang kurang dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Adapun contoh pola hidup yang mempengaruhi status gizi tidak sehat adalah kebiasaan merokok.

Pada saat ini kriteria usia anak-anak mulai dari umur 6 Tahun sampai dengan 17 Tahun diharapkan dapat sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan yang memerlukan perhatian khusus. Usia 6 sampai 17 Tahun merupakan “usia emas” dalam pembentukan sumber daya manusia baik dari segi pertumbuhan fisik maupun kecerdasan, dimana hal ini harus didukung dengan status gizi berperan penting dalam menentukan sukses tidaknya upaya peningkatan sumber daya manusia.

Status gizi pada masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi. Bila kondisi sosial ekonomi baik maka status gizi diharapkan semakin baik. Status gizi anak akan berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga (orang tua), antara lain pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah anak orang tua,

pengetahuan dan pola asuh ibu serta kondisi ekonomi orang tua secara keseluruhan.

Kebiasaan merokok terbukti memberi pengaruh negatif terhadap Indeks Masa Tubuh (IMT) pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden yang memiliki perilaku merokok yang mempunyai IMT yang tidak ideal, sementara responden yang tidak memiliki perilaku merokok hanya 16,2% saja yang memiliki IMT yang tidak ideal. Salah satu penyebab perokok remaja mengalami malnutrisi adalah asupan gizi yang kurang. Nikotin dalam rokok dapat menekan selera makan sehingga memicu perubahan perilaku yang mendorong perokok untuk mengurangi porsi makan. Proses ini dimulai saat pembakaran rokok, yaitu masuknya nikotin ke sirkulasi darah dan ke otak manusia. Merokok juga membuat makan bercita rasa bagi beberapa perokok, yang pada akhirnya mengekang selera makan.(Ilfandari, 2015)

Perokok memiliki resiko penurunan berat badan lebih tinggi daripada bukan perokok meskipun asupan kalorinya sama ataupun lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perokok mempunyai energi expenditur yang lebih tinggi daripada bukan perokok yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. Rokok jelas memberikan dampak yang buruk seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merokok dapat menyebabkan status gizi buruk, baik berupa kurang gizi maupun gizi lebih. Oleh karena itu, sudah seharusnya generasi masa kini menjauhkan diri dari rokok demi tercapainya pola hidup yang sehat dan status gizi yang lebih baik.

Besarnya pengeluaran rokok diperoleh informasi dari warga bahwa akibat dari merokok kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, harga rokok lebih mahal

daripada beras, status gizi anak dibawah standar, dan akibat menghirup udara rokok kesehatan anak terganggu dan mengakibatkan sesak nafas.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rokok merupakan kebutuhan pokok dalam keluarga pengkonsumsi rokok.
2. Besarnya pengeluaran rokok menyebabkan status gizi anak berkurang.
3. Kekurangan gizi pada anak dapat menghambat tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun motorik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Berapa jumlah pengeluaran untuk mengkonsumsi rokok yang dikeluarkan oleh rumah tangga miskin pengkonsumsi rokok.
2. Bagaimana kondisi status gizi anak pada rumah tangga miskin pengkonsumsi rokok.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan analisa deskriptif tentang pengeluaran pengkonsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Kota Medan yang digunakan untuk membeli rokok per harinya.
2. Melakukan analisis deskriptif tentang status gizi anak pada rumah tangga miskin pengkonsumsi rokok di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tentang konsumsi rokok dan bahaya merokok.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh bahaya merokok dan dampak negatif dari merokok.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan, dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income-GNI*) per kapita “*rill*” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa *rill* yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang hanya dibutuhkan adalah modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercapai (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu aliran ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem liberal itu disebabkan oleh adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital.

Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini tergantung pada sumber daya alam. Aliran klasik juga mengalami perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik, diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

1. Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri.

Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan dengan meningkatnya keterampilan kerja, penghemat waktu dalam memproduksi barang, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga melainkan modal.

Adam Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Dilain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan ekonomi mengalami kemacetan.

2. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh

merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga adanya persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses Urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengansumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengansumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat

berada pada kondisi subsisten pula. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri-ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah dikota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada di industri tersebut.

C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Peningkatan peran sektor industri dalam

perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, dimana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi dipertanian. (Todaro & Smith, 2011)

D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumber daya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

1. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
2. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.

5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol.
7. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur Panjang dan Sehat

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi

sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun terendah adalah 25 tahun.

2. pengetahuan

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen

IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(f)} = \frac{X_{(f)} - X_{(\min)}}{X_{(\max)} - X_{(\min)}}$$

Keterangan:

X_t = Komponen IPM ke- i

$X_{(\min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke- i

$X_{(\max)}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke- i

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$\text{IPM}_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X(i, f)$$

Keterangan:

Indeks $X_{(i,j)}$ = Indeks Komponen IPM ke i untuk wilayah ke- j

i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)

j = 1, 2, k (wilayah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting dari IPM antara lain yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Ketiga, bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). (www.bps.go.id)

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

IPM yang lebih kecil maka dikategorikan sebagai wilayah dengan IPM rendah. Untuk IPM bersekitar antara 60 sampai dengan 70 maka di kategorikan sebagai wilayah dengan IPM sedang. Akan tetapi, jika IPM bersekitar antara 70 sampai dengan 80 dikategorikan termasuk IPM tinggi. Sedangkan untuk yang memiliki IPM 80 ke atas maka wilayah tersebut termasuk memiliki IPM yang sangat tinggi. (www.ipm.bps.go.id)

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan mikro. (Boediono, 1999)

A. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya biaya pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, menurut (Boediono 1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pilar utama yaitu dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer Payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 merupakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner Adolf mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pesentase terhadap PDB.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Sumber : Mabgkoesubroto, 1997

Ket:

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

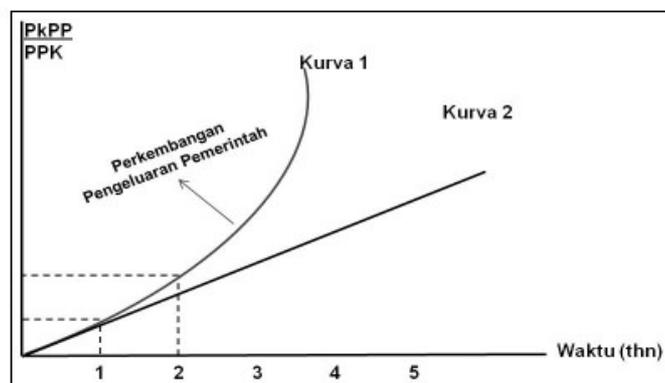
YpC : Produk atau pendapatan nasional perkapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wegner



Sumber: Mangkoesubroto, 1997

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak lepas dengan masyarakat lain.

2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

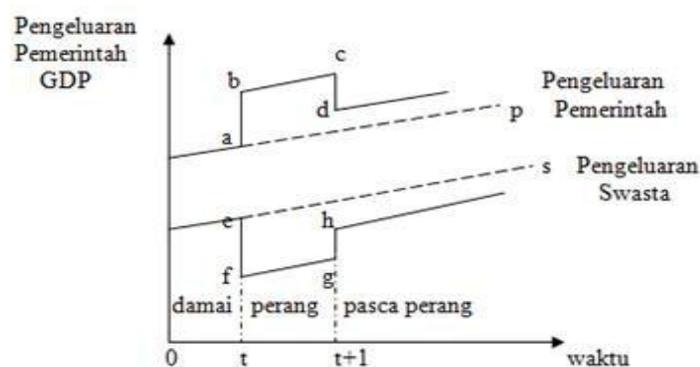
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada satu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek pengganti (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi juga karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

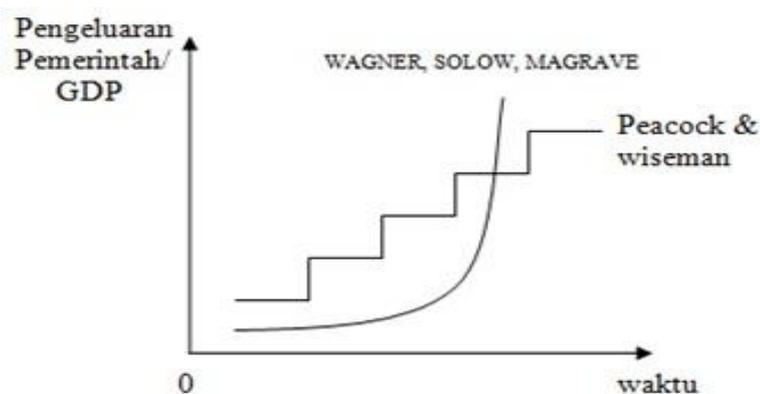


Sumber: Mangkoesubroto, 1997

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AP. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AB dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan segmen BC. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke P. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dilihat pada gambar dibawah ini:

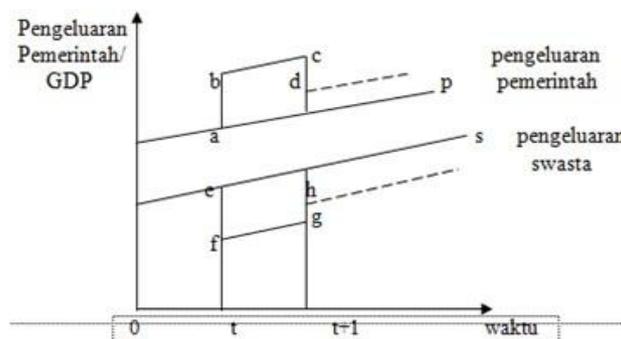
Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat



Sumber: Mangkoesubroto, 1997

Rostow Mugrave dan Peacock Wiseman, Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadi gangguan sosial memang terjadi pengalih aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Gambar 2.4 Kurva Bird



Sumber: Mangkoesubroto, 1997

B. Teori Mikro

Menurut Boediono (1999) Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang ublic yang akan

disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

- $U_i = f(G, X)$
- G = vector dari barang public
- X = vector barang swasta
- i = individu; = 1, ... m
- U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang public dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seseorang individu (i) membutuhkan barang publik (k) sebanyak G_k , untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan pemerintah berusaha untuk peningkatan penjagaan keamanan, dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan Tingkat Output

- $U_p = g(X, G, S)$
- U_p = Fungsi Utilitas
- S = Keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan
- G = Vector Barang Public

X = Vector Barang Swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat mewakili seorang pemilih: $\text{Max } U_i = f(X, G)$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya: $P \cdot X + t$

$B < M_i$

P = vector harga barang swasta

X = vector barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang diwakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses yaitu: dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tariff pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga ia bertindak pengambil output (*Output Taker*).

C. Kebijakan Pemerintah

Tahun 2011 hampir sebanyak 500 petugas kesehatan, bidan, ahli gizi, dan relawan masyarakat telah mendapatkan manfaat dari pelatihan khusus yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami penyebab terhambatnya pertumbuhan tinggi badan juga penyebab kekurangan gizi, dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu para keluarga dan merawat anak-anak mereka secara lebih efektif. Aksi-aksi masyarakat pun telah di dukung, dimana di dalamnya termasuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan sarana kebersihan, mempromosikan pemberian ASI yang lebih

baik, termasuk pemberian makanan pendamping ASI, dan juga memantau status gizi anak-anak, sebagai bagian dari rencana pembangunan lokal di wilayah mereka.

Pendidikan gizi tengah dipadukan ke dalam program pemerintah yang lainnya disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu penyediaan bantuan berupa uang tunai kepada para keluarga miskin sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam memprakarsai kesehatan dan pendidikan. Karya yang cukup besar telah dilaksanakan untuk menambah pedoman, standar, dan materi pelatihan dalam pengelolaan kondisi gizi buruk yang parah, memfasilitasi ASI dan makanan pendamping ASI, dan juga meningkatkan program-program zat gizi mikro.

Dr.Minarto direktur Gizi untuk Kementerian Kesehatan Indonesia, juga menggarisbawahi pentingnya pergeseran kebijakan yang coba di usung oleh kemitraan ini. “Indonesia adalah pemain terkemuka dalam mengakselerasi perbaikan gizi (SUN) global, dan melalui kolaborasi ini kita telah mendirikan jaringan kunci diantara departemen-departemen pemerintah, badan-badan PBB, lembaga bantuan internasional, organisasi-organisasi non pemerintah, dan juga sektor swasta, yang akan membantu lebih baik lagi dalam mengawasi penargetan sumber-sumber daya, tanggapan program yang lebih baik, dan yang terpenting reformasi kebijakan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak kita.”

Berbicara untuk Uni Eropa, yang telah menyumbangkan sebesar €20 juta (US\$245 juta) kepada UNICEF untuk mengatasi masalah kekurangan gizi diseluruh wilayah Asia dan Pasifik, dan ASEAN, menggaris bawahi bahwa mengurangi gizi buruk adalah prioritas utama, dimana belian juag menegaskan

bahwa Uni Eropa memiliki keterlibatan yang besar dalam perang global melawan gizi buruk dan mekanisme koordinasi untuk mengakselerasi perbaikan gizi (SUN). Terhambatnya pertumbuhan tinggi badan juga diidap oleh lebih dari 1 anak dari 3 anak-anak dibawah usia 5 tahun di Indonesia, sementara sedikitnya 1 anak dari 5 anak-anak dalam kelompok usia ini pun kekurangan berat badan.

2.1.3 Teori Konsumsi

Teori Konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut.

Menurut Sukirno (2007) teori konsumsi Keynes dinamakan *absolute income hipotesis* atau hipotesis pendapatan mutlak. Persamaan aljabar fungsi konsumsi tersebut adalah:

$$C = a + b Yd \dots \dots \dots (3)$$

Dimana C menggambarkan nilai konsumsi yang dilakukan oleh semua rumah tangga dalam perekonomian.

a adalah konsumsi yaitu tingkat konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

b adalah kecondongan mengkonsumsi marginal (MPC) yaitu proporsi diantara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan.

Sedangkan **Yd** adalah pendapatan disposable.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aimon (2004) model dasar dalam penulisan ditulis secara sistematis sebagai berikut:

$$C = C_0 + cY \quad 0 < c < 1 \dots \dots \dots (4)$$

Dimana C adalah konsumsi kedelai, Y adalah produksi atau output kedelai, C_0 adalah konstanta dan c adalah hasrat marginal untuk mengkonsumsi kedelai. Y disini dapat dijelaskan dalam dua bentuk, Y dalam bentuk produksi dan Y dalam bentuk pendapatan (pendapatan perkapita) atau diberi simbol I .

Oleh karena konsumsi kedelai masyarakat Indonesia tidak bisa dipenuhi oleh produksi kedelai Indonesia itu sendiri, maka dilakukan impor kedelai. Sehubungan dengan itu, penelitian ini juga menggunakan teori impor.

2.1.4 Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.

Defenisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

1. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.

2. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
3. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, berternak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani.

Pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Sehingga berdasarkan pengertian diatas indikator pendapatan orang tua adalah besarnya pendapatan yang diterima orang tua siswa tiap bulannya.

Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyebabkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil untuk menyekolahkan anaknya, sehingga membutuhkan suatu pengorbanan pendidikan. Pengorbanan pendidikan itu dianggap sebagai suatu investasi di masa depan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu bagian investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

b. Kriteria Pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS 2014) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan yaitu:

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000,00 per bulan.
2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp 2.500.000,00 s/d Rp 3.500.000,00 per bulan.
3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp 1.500.000,00 s/d 2.500.000,00 per bulan.
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp 1.500.000,00 per bulan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seseorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat di ukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan.

Jenis-jenis Pendapatan

2.1.4.1 Teori Pendapatan Nasional

Menurut Dumairy (1996:37) Pendapatan Nasional dapat berarti sempit dan luas, Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan arti luas pendapatan nasional dapat merujuk pada Produk Domestic Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP): atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP): Produk National Neto (PPN) atau Net National

Product (NNP) atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

Pendapatan Nasional dapat juga diartikan sebagai Produksi Nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan seluruh anggota masyarakat suatu Negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.

2.1.5 Konsep Pendapatan Nasional

A. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara atau domestic selama satu tahun.

$$\text{GDP} = \text{Pendapatan Masyarakat DN (Dalam Negeri)} + \text{Pendapatan Asing DN (Dalam Negeri)}.$$

Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu Negara atau domestic tersebut (Dumairy 1996:37).

B. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) merupakan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (Nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga Negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. (Dumairy 1996:37).

$$\text{GNP} = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (Luar Negeri)} - \text{Pendapatan Asing DN}.$$

C. Produk Nasional Neto (NNP)

Penyusutan adalah pergantian barang modal bagi barang atau peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan relatif kecil, (Dumairy 1996:37)

D. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. (Dumairy 1996:38)

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan dan lain-lain.

E. Pendapatan Perorangan (PI)

Pendapatan perorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji PNS maupun pendapatan pengusaha yang di dapatkan secara berantai. (Dumairy 1996:38)

$$\text{PI} = \text{NNI} - \text{Pajak Perusahaan} - \text{Iuran} - \text{Laba ditahan} + \text{Transfer Payment}$$

Transfer Payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, Seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan penganggaran, dan sebagainya.

F. Pendapatan yang di belanjakan

Disebut juga sebagai Disposable Income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi Investasi. (Dumairy 1996:39)

$$DI = PI - \text{pajak Langsung}$$

Pajak langsung yang bebannya tidak dapat dialihkan dengan pihak lain seperti pajak pendapatan.

2.1.6 Teori Pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.

Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut UU No 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan

2.1.7 Pendapatan Rumah Tangga

Keluarga adalah dua atau lebih dari individu yang tergantung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam peranannya masing-masing dari menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (Syafrudin, 2009)

Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pengasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Pendapatan keluarga sesuai dengan pengertian Badan Pusat Statistik, berasal dari tiga sumber utama:

- a. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu upah dan gaji, keuntungan dan bonus dari jasa yang merupakan dari tenaga kerja.
- b. Balas jasa yang diperoleh dari bunga, bagi hasil, sewa, dan lainnya yang diterima oleh rumah tangga.
- c. Pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain. (*transfer payment*). Contohnya dapat berubah hibah maupun pemberian yang

berasal dari rumah tangga lain, perusahaan, dan luar negeri. (SNSE Indonesia Tahun 2005)

Pendapatan rumah tangga dapat diketahui dengan menjumlahkan pendapatan keluarga dari semua sumber pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga dapat beragam, ukuran pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, rumah tangga adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dari bekerja.

Pendapatan keluarga digolongkan menjadi 2 yaitu:

1. Pendapatan permanen (*permanent income*), adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, pendapatan dari gaji, upah, pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).
2. Pendapatan sementara (*transitory income*), adalah pendapatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada hakikatnya pendapatan nasional merupakan dari gabungan seluruh pendapatan rumah tangga dalam perekonomian. Pendapatan rumah tangga diperoleh sebagai balas jasa atas faktor produksi yang telah diberikan dari rumah tangga penyedia faktor produksi (tenaga kerja) kepada perusahaan dalam perekonomian 2 sektor. Namun pada kenyataannya, pendapatan nasional tidak bisa disamakan dengan pendapatan rumah tangga.

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Pertama sebagian pendapatan rumah tangga diperoleh bukan dari penawaran faktor-faktor produksi, sebagai contoh adalah beasiswa dan pendapatan berupa pensiun.

Kedua, pendapatan faktor-faktor produksi, sebagian tidak dibayarkan kepada rumah tangga sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima rumah tangga sebenarnya sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pendapatan faktor yang tidak dibayarkan kepada rumah tangga ditambah dengan pendapatan rumah tangga yang bukan berasal dari penawaran faktor produksi. (Sadono Sukirno 1999)

Dalam pendapatan rumah tangga terdapat 3 komponen dari pendapatan faktor-faktor produksi yang tidak diterima oleh rumah tangga yaitu, pertama pajak keuntungan perusaha corpora, kedua keuntungan yang tidak dibagi, ketiga kontribusi untuk dana pengangguran, sedangkan untuk pendapatan yang diterima diluar pendapatan dari penawaran faktor produksi diperoleh dari pembayaran pindahan, (*transfer payment*) dan pendapatan dari bunga.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwasanya pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun, *Soekartawi* menjelaskan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatan. (Sadono Sukirno 1999).

2.1.8 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya GDP atau GNP, karena GDP atau GNP tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GDP atau GNP tersebut. GNP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur.

a. Arti Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya dalam satu tahun). Pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut:

$$GDP \text{ perkapita} = \frac{GDP \text{ tahun } x}{Jumlah \text{ Penduduk tahun } x}$$

Ada dua cara untuk menghitung pendapatan perkapita, yaitu berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan perkapita nominal, sedangkan jika dihitung berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan perkapita riil. Pendapatan perkapita nominal adalah pendapatan perkapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan perkapita riil adalah pendapatan perkapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

2.1.9 Pengeluaran Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bagian fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama

serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu (bps.go.id). Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakaian barang dan jasa sekaligus juga faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan.

Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga, deviden, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian Cuma-Cuma). Perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri, atau ditempati oleh pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak di golongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga.

Ada dua cara penggunaan pendapatan atau dengan kata lain dengan pengeluaran rumah tangga, yang pertama: Membelanjakan untuk barang konsumsi, Dan yang kedua: tidak membelanjakannya seperti di tabung atau menabung. Pengelolaan rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Menurut Sukirno (1994: 38), menyatakan bahwa pengeluaran rumah tangga sebagai suatu nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun atau periode waktu tertentu, pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan misalnya membeli makanan, pakaian, dan lain-lain.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2007: 36) mengartikan pengeluaran sebagai suatu penggunaan uang, barang, atau jasa yang digunakan baik untuk keperluan konsumsi makanan maupun non makanan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama satu bulan.

Pengertian pengeluaran secara umum sering dinyatakan sebagai tindakan seseorang (individu) atau kelompok dalam membelanjakan pendapatannya dengan tujuan membeli barang dan jasa yang diinginkan. Pengeluaran tidak selalu untuk membeli barang-barang yang dapat dimakan dan diminum, namun di dalam pengeluaran itu termasuk semua barang dan benda-benda yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam penerapannya, peningkatan pendapatan individu atau rumah tangga biasanya digunakan untuk menambah konsumsi bahan pokok guna memenuhi kehidupan sehari-hari sampai melewati batas tertentu dan batas tersebut telah terlampaui maka peningkatan pendapatan individu atau rumah tangga cenderung dipergunakan untuk mengkonsumsi barang mewah dalam kehidupan sehari-hari.

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup karena pengeluaran konsumsi tersalur ke pengeluaran pangan, sandang, perumahan, bahan bakar, pengangkutan, hiburan, dan perawatan kesehatan. Pada tingkat pendapatan yang rendah pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi pangan adalah yang terpenting karena pangan adalah yang

terpenting karena pangan adalah jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

2. Pengeluaran Non Konsumsi Rumah Tangga (Saving)

Tabungan rumah tangga diperoleh apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer (bps.go.id). Tabungan keluarga sifatnya statis dan tidak berbunga, tabungan yang demikian hanya hoording. Untuk meningkatkan tabungan keluarga statis ke arah tabungan dinamis atau produktif, pemerintah menarik para penabung dengan cara tabanas dan taska (Chainiago dan Mudjiharjo 1995).

Rumah tangga dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya pengeluaran belanja yang tak diduga dan tak diketahui sebelumnya.
2. Memperbaiki taraf hidup seseorang dimata masyarakat (misalnya untuk tabungan konsumsi mewah).
3. Untuk dapat membeli barang-barang tertentu yang tidak dapat dimiliki dengan pendapatan sekarang ini.
4. Cadangan untuk masa depan.
5. Sebagai jaminan misalnya terjadi pendapatan yang turun naik.

2.2 Regulasi

2.2.1 Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah bukan saja dalam artian government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula govermance yang menyentuh pengolahan sumber daya publik (Suharto, 2007:3). Banyak defenisi mengenai kebijakan publik, sebagian ahli

memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya.

Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai Whatever government choose to do not to do yang artinya “kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Bridgman dan Davis dalam Suharto, 2007:3).

Sebuah kebijakan yang diambil pemerintah awalnya tidak berlangsung diagendakan menjadi sebuah kebijakan publik. Ada tahap-tahap sebuah masalah pada akhirnya diagendakan oleh pemerintah untuk diambil kebijakannya. Pemerintah melihat apakah masalah itu menyebar luas di masyarakat, bahkan sampai membuat masyarakat bingung sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan berupa kebijakan mengenai masalah tersebut agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, modal atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi mengenai perilaku kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu memperkirakan keberhasilan yang dicapai dan dinaikkan maka akan banyak pula perusahaan yang menaikkan harga produksinya yang berakibat pada naiknya barang-barang yang mengakibatkan masyarakat kelas menengah kebawah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebuah proses kebijakan yang baik biasanya merumuskan asumsi-asumsinya secara jelas, sehingga para pelaksana kebijakan memahami teori dan

model kebijakan yang mendukung keputusan dan rekomendasi di dalamnya. Banyaknya kepentingan dalam perumusan sebuah kebijakan, perbaikan dalam kebijakan berikutnya tidak selalu mudah dilakukan. Temuan dilapangan mengenai konsekuensi kebijakan perlu dicatat dan di dokumentasikan secara baik dalam sebuah naskah kebijakan, sehingga dapat dipelajari (Bridgman dan Davis dalam Suharto, 2007: 8-9).

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan”.

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Easton mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Penjelasan Easton ini membawa implikasi terhadap kebijakan publik yang sekaligus merupakan ciri dari kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang lebih mengarah pada tujuan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dengan yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif (Suharno, 2008: 23-24).

2.2.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok.

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” dengan mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an”. Miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedangkan kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan nafkah untuk makan dan kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah nilai garis standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Menurut Oscar Lewis kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti: malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti: birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya.

Freidman (dalam Usman, 2006: 43) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi, dan lain-lain), tetapi juga pada (2) net work atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Kemiskinan bisa diartikan sebagai situasi yang serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Dengan demikian mengentaskan penduduk miskin itu perlu bantuan pihak luar dan si miskin itu sendiri. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang memiliki sesuatu namun sedikit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2003) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serta kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dngan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengatasi kemiskinan di suatu Negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan $>$ Rp 350.610
2. Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp 280.488 – Rp 350.610
3. Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp 233.740 – Rp 280.488
4. Miskin, pengeluaran per orang per bulan $<$ Rp 233.740
5. Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. Jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa pendekatan yang sistematis (Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*) (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012).

Dari banyaknya definisi kemiskinan, kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi

kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*poverty*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*solation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksud oleh Chambers adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial – ekonomi, (3) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

2.2.4 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum. Umumnya

kondisi ini di alami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

2.2.5 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Menurut *Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan*, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan.

Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah

tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lansia, dan yatim – piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Beberapa Faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (2009: 28-29) yaitu:

a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk di dalam dunia kerja.

b. Malas Bekerja

Adanya sikap malas menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan

kerja baru sedangkan hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

e. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.3 Penelitian Terdahulu

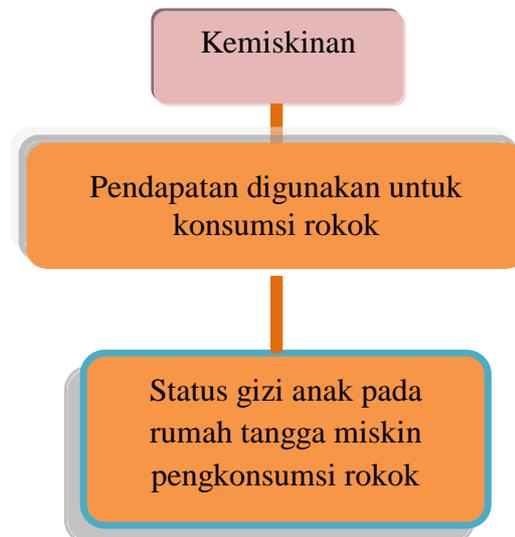
Tabel 2.1

Judul, Nama Penulis, Tahun	Metode Analisis	Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok pada rumah tangga miskin (studi: Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalinggo) Rizky Aryasa Pratama (2018)	Metode Estimasi OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rokok dan konsumsi rokok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rokok.
2. Analisis pengaruh konsumsi rokok terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Agnes Marisca Dian Sari (2016)	Metode Estimasi OLS	Ada pengaruh garis kemiskinan terhadap konsumsi rokok di Jawa Tengah. Adapun pengaruh positif dan signifikan, ketika konsumsi rokok di Jawa Tengah naik maka

		meningkatkan garis kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Perbedaan status gizi balita pada keluarga miskin perokok dan bukan perokok Lilie Wijayati (2016)	Analisis Deskriptif	Pada penelitian Priano tahun 2010 menyebutkan bahwa status gizi anak dari keluarga perokok lebih buruk dibandingkan status gizi anak dari keluarga bukan perokok.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendekatan deskriptif induktif, menurut Kuncoro (2003, hal 36) bahwa metode deskriptif induktif meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis mengenai pertanyaan status terakhir dari subjek penelitian.

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka penelitian tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. (Nazir 2005, hal 58)

3.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pendapatan Rumah Tangga	Nilai pendapatan akan memenuhi kebutuhan sehari-hari	www.bps.go.id
Pengeluaran Rumah Tangga	Pengeluaran untuk kebutuhan makanan anak pengkonsumsi rokok pada rumah tangga miskin	Responden
Status Gizi	Kecukupan Gizi standar Anak rumah tangga miskin	www.depkes.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Adapun alasan penelitian memilih lokasi ini dikarenakan Kota Medan terdapat banyak anak yang gizinya dibawah standar.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari 2019.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengumpulan data, pengajuan judul dan pengesahan	■	■	■																			
2.	Penulisan Profosal				■	■	■	■															
3.	Seminar Profosal								■	■	■												
4.	Analisa Data											■	■	■									
5.	Penulisan Laporan													■	■	■							
6.	Sidang Meja Hijau																		■	■			

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang mengkonsumsi rokok di Kota Medan.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010: 62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *non probability sampling*. *Non Probability Sampling* adalah

penggunaan bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi atau untuk menginformasikan tentang proses yang bermakna di luar kasus-kasus tertentu, individu atau situs yang diteliti. (Wikipedia)

Judgment Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. *Judgment Sampling* biasanya digunakan ketika sejumlah individu memiliki sifat yang menarik. Ini merupakan satu-satunya teknik sampling yang tepat dalam memperoleh informasi dari populasi yang sangat spesifik.

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek yaitu darimana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi dalam 2 bagian. (Suharsimi Arikunto, 2010)

1. Data Primer : Data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada responden.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dan membedakan hasil pengamatan untuk perlakuan yang tidak sama, yang disebut dengan uji beda 2 rata-rata, (Dhani, Roswita).

- 1. Analisis Deskriptif:** yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari kuisioner baik secara presentasi, maupun dengan grafik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Medan

4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Medan terletak antara $3^{\circ}.27'$ - $3^{\circ}.47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}.35'$ - $98^{\circ}.44'$ Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut.

1) Batas

- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Kecamatan Medan Perjuangan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kecamatan Medan Denai
- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Kabupaten Deli Serdang

2) Geologi

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat, dan timur.

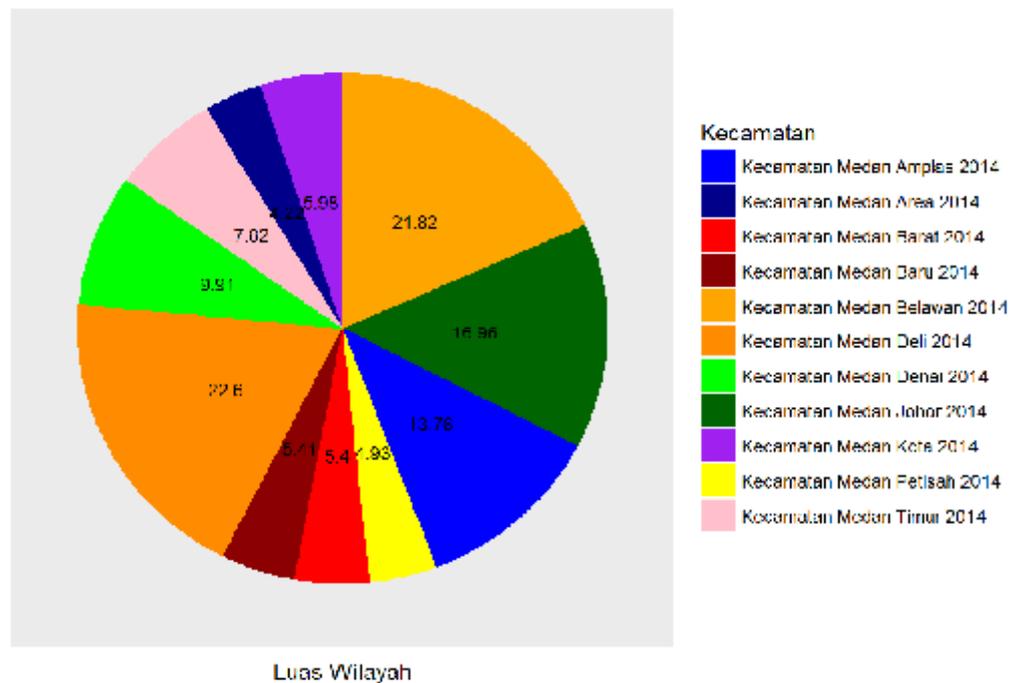
Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun BMKG Medan pada tahun 2017 yaitu $23,3^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum yaitu $34,3^{\circ}\text{C}$ serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu $23,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum yaitu $33,7^{\circ}\text{C}$.

Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78 – 85%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 2,4m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 108,2 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2017 perbulan 14 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 179 mm.

Gambar 4.1 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Medan tahun 2017

Luas Wilayah di Beberapa Kecamatan Kota Medan (km²)



4.1.2 Kondisi Demografis

Kecamatan Medan Tembung dengan luas wilayahnya 7,78 KM² Kecamatan Medan Tembung adalah daerah pintu gerbang Kota Medan di sebelah Timur yang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Deli Serdang atau daerah lainnya melalui transportasi darat, dengan penduduknya berjumlah 133.579 Jiwa. Industri Pembuatan Kerupuk di Kecamatan Medan Tembung ini banyak terdapat jenis usaha industri kecil seperti kerajinan rotan. Disamping itu, banyak pula yang bergerak dibidang usaha industri rumah tangga seperti pembuatan sepatu dan

konveksi. Sebagai informasi bagi investor dan masyarakat pada Kecamatan Medan Tembung ini terdapat 14 Ha pertanian.

4.1.3 Sarana Pendidikan, Kesehatan, Ibadah, dan Transportasi

Total sarana pendidikan di Kecamatan Medan Tembung sebanyak 120 sarana pendidikan diketahui data tersebut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari SD, MIN, SMP, MTsN, SMA, dan SMK dalam sarana pendidikan tersebut baik swasta maupun negeri. Bicara pendidikan kita tidak terlepas dari permasalahan kesehatan, akan kebutuhan hidup sehat bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan. Adapun jumlah Puskesmas di Kecamatan Medan Tembung terdapat 1 unit Puskesmas dan 20 Poskedes.

Oleh karena itu dari besarnya jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung dari berbagai macam-macam suku dan agama sebesar 133.579 Jiwa yang memiliki sarana Ibadah umat adalah sebagai berikut: 128 Masjid tempat beribadah umat Islam sedangkan Gereja Protestan 24 unit dan Gereja Katolik memiliki 16 unit dan kemudian sarana transportasi di Kecamatan Medan Tembung mulai dari roda 4 seperti angkot, dan roda 3 seperti becak, dan lain-lain.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang merokok di Kota Medan. Adapun jumlah masyarakat yang akan dijadikan sebagai responden yaitu 80 orang. Kemudian karakteristik yang dilihat dalam penelitian ini adalah dilihat berdasarkan usia responden, tingkat pendidikan, serta alasan responden mengkonsumsi rokok.

Tabel 4.1 Usia Responden

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	21 – 30	53	42,4
2	31 – 40	17	13,6
3	41 – 50	7	5,6
4	51 – 60	3	2,4
Jumlah		80	64

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2019 (diolah)

Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa usia responden sangat bervariasi, dalam pembagiannya dimana rata-rata responden berusia 21 – 60 tahun. Jumlah usia responden yang mendominasi dan tertinggi terdapat pada usia 21 – 30 tahun yaitu sebesar 53 responden dengan persentase menjadi 42,4 persen sedangkan yang terendah terdapat pada usia 51 – 60 tahun yaitu 3 responden dengan persentase mencapai 2,4 persen.

Tabel 4.2 Jenis kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki- laki	80	64
Jumlah Responden		80	64

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui perokok yang mengkonsumsi rokok mayoritas Laki – laki sebanyak 64 persen dengan jumlah 80 orang. Kepala keluarga di dalam rumah tangga lebih mementingkan untuk membeli rokok daripada untuk memenuhi gizi anak.

Tabel 4.3 Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMP	3	2,4
2	SMA	70	56
3	Sarjana	7	5,6
Jumlah Reponden		80	64

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui jumlah reponden tingkat pendidikan paling banyak adalah SMA dengan persentase 56 persen dan berjumlah 70 orang. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan terakhir SMP dengan persentase 2,4 persen dan berjumlah 3 orang.

Tabel 4.4 Pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase
1	500.000/bln	2	1,6
2	600.000 – 1.000.000/bln	21	16,8
3	1.100.000 – 1.400.000/bln	21	16,8
4	1.500.000 – 2.000.000/bln	36	28,8
Jumlah Reponden		80	64

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2019 (diolah)

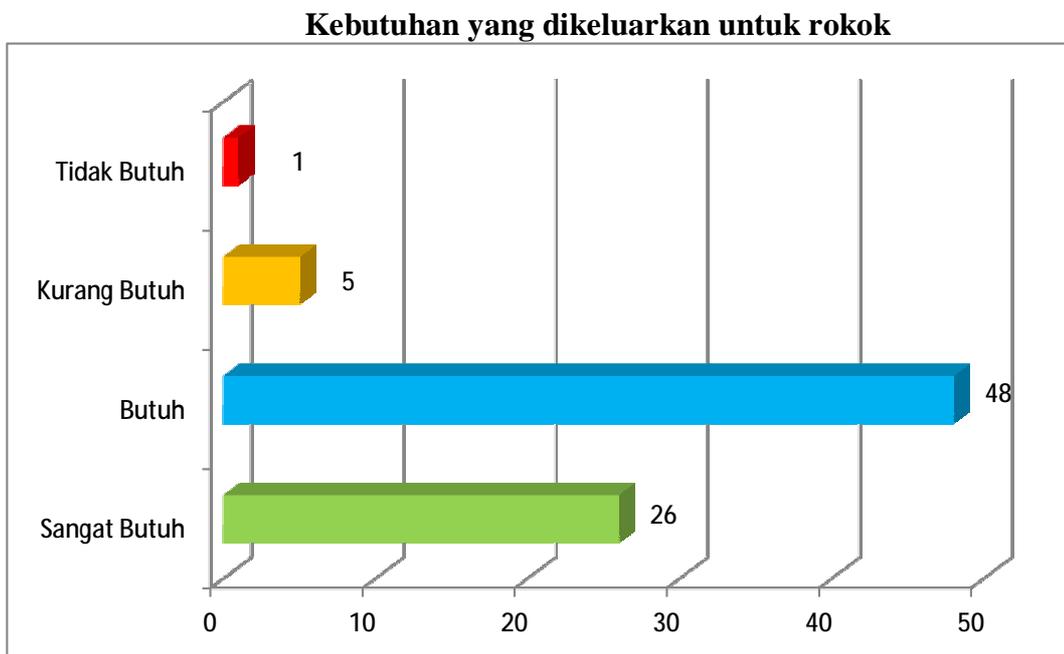
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang pendapatannya paling tinggi yaitu sekitar Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 perbulan dengan persentase 28 persen dan berjumlah 36 orang. Sedangkan pendapatan yang paling rendah yaitu sekitar Rp 500.000 perbulan dengan persentase 1,6 persen dan berjumlah 2 orang.

4.3 Analisis Penelitian

4.3.1 Analisis Deskriptif Tentang Pengeluaran Pengonsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin di Kota Medan

Pada Bab ini penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menyebarkan angket (Kuisisioner) kepada masyarakat di Kota Medan dengan sampel yang telah ditetapkan sebanyak 80 responden. Menganalisis data merupakan suatu upaya untuk menata dan mengelompokkan data untuk menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan jawaban sampel penelitian. Analisis data yang dimaksud adalah interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun data-data yang di analisis pada bab ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2



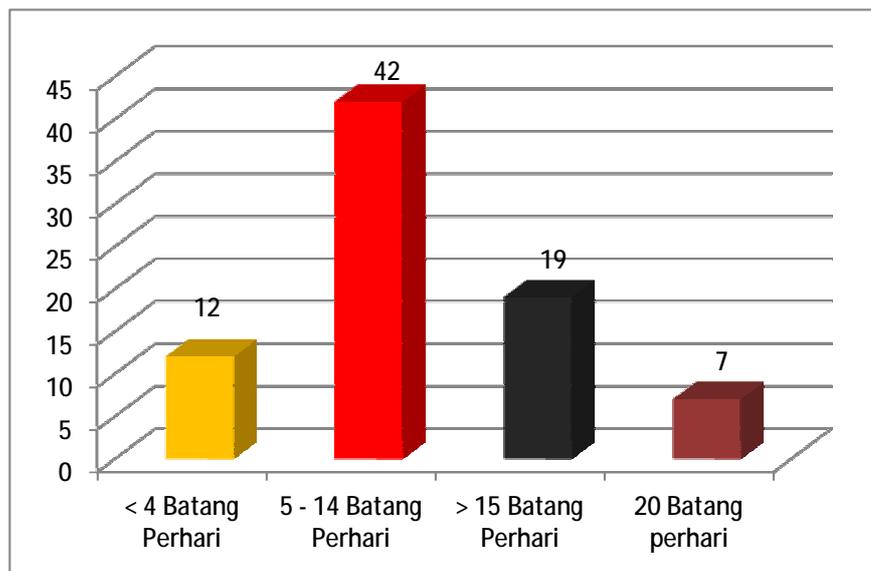
Sumber : Diperoleh dari Data Kuisisioner

Hasil penelitian pada masyarakat Kota Medan tentang kebutuhan untuk mengkonsumsi rokok 38,4% (48 Responden) yang menyatakan Butuh, 20,8% (26

Responden) yang menyatakan Sangat Butuh, 4% (5 Responden) yang menyatakan Kurang Butuh, dan 0,8% (1 Responden) yang menyatakan Tidak Butuh. Masyarakat yang mengatakan rokok merupakan kebutuhan pokok dengan alasan karena faktor kebiasaan dan juga karena sudah mengalami kecanduan.

Gambar 4.3

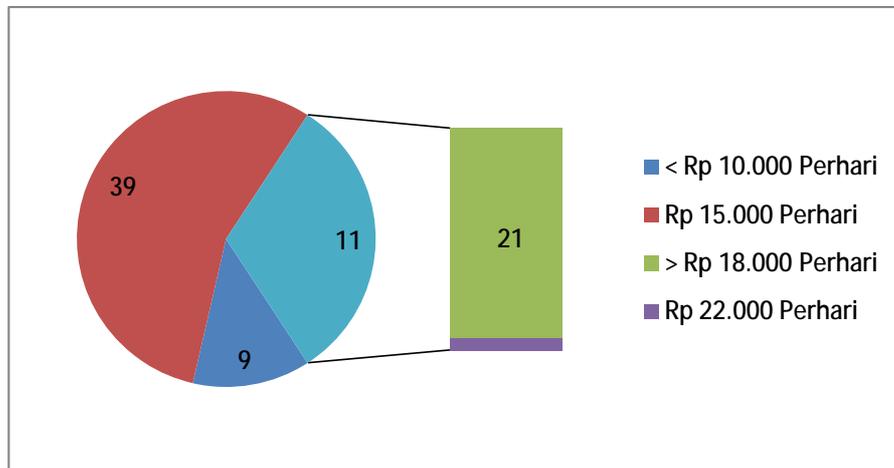
Jumlah rokok yang dihabiskan perhari



Sumber : Diperoleh dari data kuisisioner

Setelah melakukan penelitian, ternyata masyarakat di Kota Medan juga banyak menghabiskan uangnya untuk mengkonsumsi rokok perharinya. Dari jumlah responden yang kita dapatkan banyaknya jumlah rokok yang dihabiskan dalam perhari sebesar 33,6% perhari (42 Responden) yang menghabiskan 5 – 14 batang perhari, 15,2% (19 Responden) yang menghabiskan ≥ 15 batang perhari, 9,6% (12 Responden) yang menghabiskan ≤ 4 batang perhari, dan 16% perhari (20 Responden) yang menghabiskan 20 batang perhari. Merokok merupakan kebiasaan bagi kepala rumah tangga karena merokok merupakan suatu kebiasaan yang sudah tidak dapat dihentikan begitu saja.

Gambar 4.4
Biaya membeli rokok



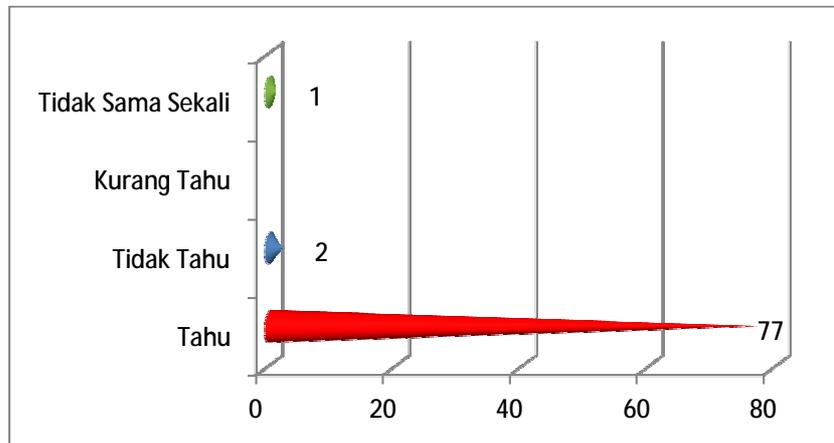
Sumber : Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari diagram diatas, dapat kita ketahui bahwa banyaknya uang keluar yang di Kota Medan untuk membeli rokok. Uang yang dikeluarkan sebesar Rp 15.000 dalam perhari sebanyak 31,2% (39 Responden), Uang yang dikeluarkan sebesar Rp 18.000 perhari sebanyak 16,8% (21 Responden), uang yang dikeluarkan sebesar Rp 10.000 perhari sebanyak 8,8% (11 Responden), dan uang yang dikeluarkan sebesar Rp 22.000 perhari sebanyak 7,2% (9 Responden).

Besarnya jumlah pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi rokok sangat mempengaruhi baik atau buruknya status gizi anak. Pengeluaran rokok yang sangat besar menyebabkan status gizi anak berkurang. Kepala keluarga lebih mementingkan uangnya habis untuk membeli rokok dari pada untuk memenuhi kebutuhan status gizi anak. Kesehatan anak berpengaruh besar terhadap kecerdasan anak dimasa yang akan datang.

Gambar 4.5

**Pengetahuan Rumah Tangga bahwa mengkonsumsi rokok dapat
meyebabkan kanker paru**



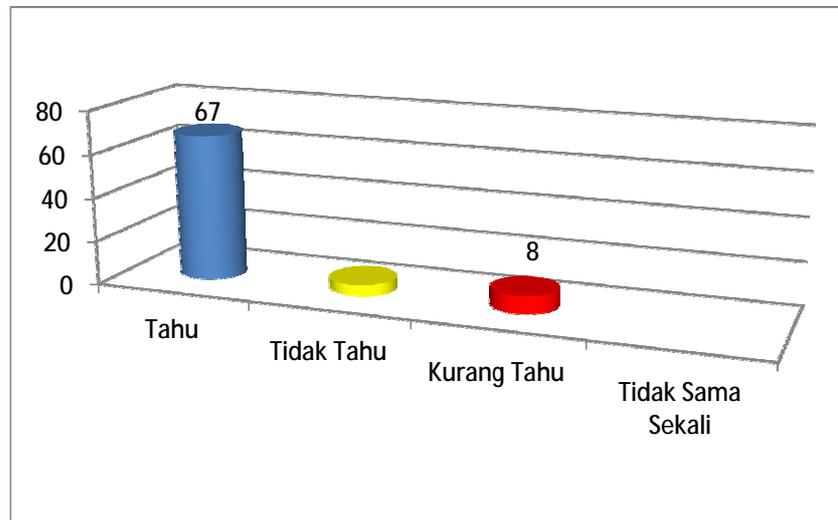
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok yang dapat menyebabkan kanker paru sangat banyak yang mengetahui. Walaupun banyak yang mengetahuinya mereka tetap saja megkonsumsinya dengan alasan sudah kecanduan dan susah untuk berhenti merokok. Dari jumlah Kuisisioner yang disebar di Kota Medan, terdapat 61,6% jumlah (77 Orang) masyarakat yang mengetahui tentang bahaya mengkonsumsi rokok. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui hanya sejumlah 1,6% (2 Orang) saja.

Banyak kepala keluarga yang mengetahui bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru. Tetapi mereka masih saja mengkonsumsi rokok karena alasan sudah menjadi kebiasaan dan kecanduan. Merokok menurut mereka dapat menghilangkan stress, dan dapat menyebabkan kesenangan bagi yang mengkonsumsinya.

Gambar 4.6

Pengetahuan tentang bahaya perokok aktif dan pasif



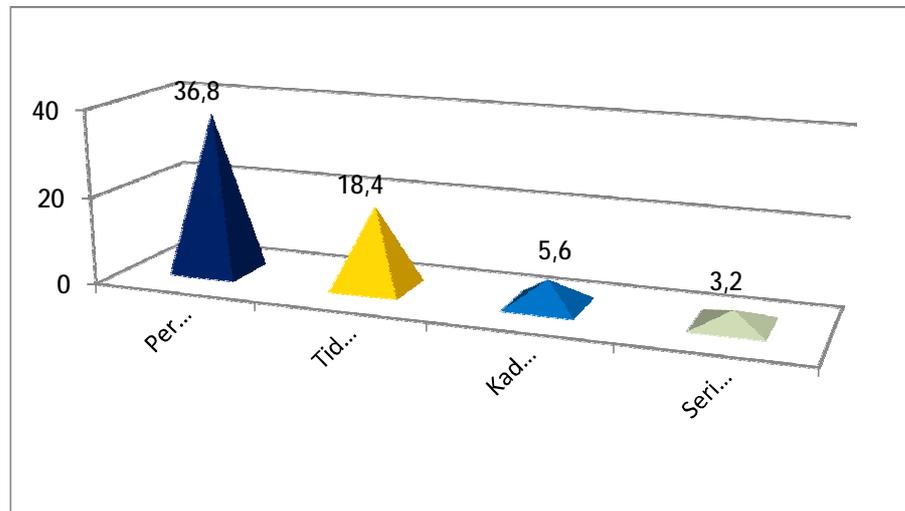
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang mana yang lebih berbahaya antara perokok aktif dan pasif sangatlah jelas. Dapat dilihat bahwa masyarakat di Kota Medan lebih banyak yang mengetahui bahaya perokok pasif yaitu sebanyak 53,6% (67 orang) yang mengetahuinya, yang kurang tahu tentang bahaya antara perokok aktif dan perokok pasif sebanyak 6,4% (8 orang), dan yang tidak tahu tentang bahaya perokok aktif dan pasif sebanyak 4% (5 orang).

Perokok aktif tidak mempedulikan bahaya asap yang dihirup oleh perokok pasif. Namun meski begitu, bukan berarti perokok pasif harus mengabaikan bahaya dari asap rokok. Menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru.

Gambar 4.7

Merokok di sekitar Anggota Keluarga



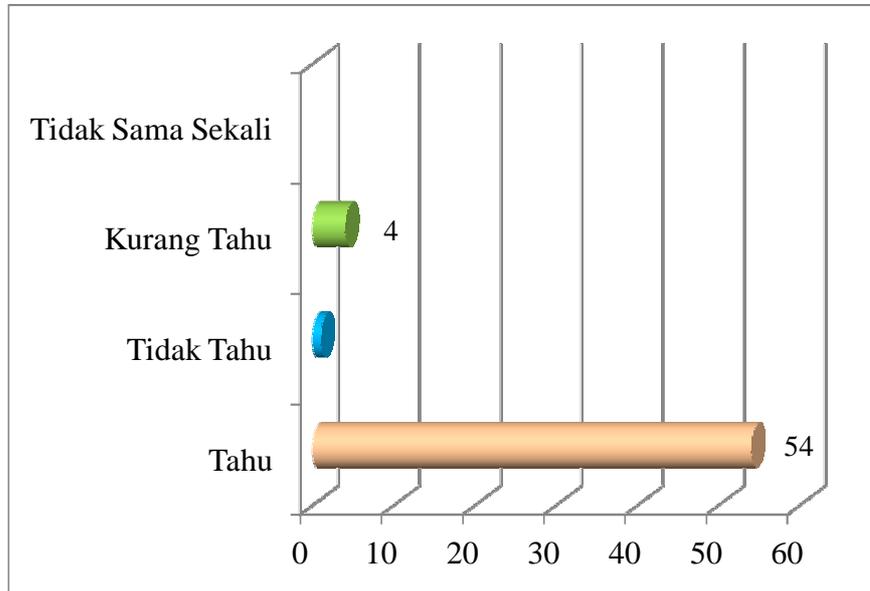
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kepala keluarga pernah mengkonsumsi rokok di sekitar anggota keluarga. Diperoleh dari hasil kuisisioner masyarakat di Kota Medan kepala keluarga yang pernah merokok di sekitar keluarganya sebesar 36,8% (46 Orang), yang tidak pernah mengkonsumsi rokok di sekitar anggota keluarganya sebesar 18,4% (23 Orang), yang kadang-kadang mengkonsumsi rokok di sekitar keluarganya sebesar 5,6% (7 Orang), dan yang sering mengkonsumsi rokok di sekitar anggota keluarga sebesar 3,2% (4 Orang). Alasannya, menurut kepala keluarga sendiri merokok itu tidak membedakan tempat untuk mengkonsumsi rokok. Selain itu, merokok itu juga merupakan faktor kebiasaan yang susah untuk dihilangkan.

Mengkonsumsi rokok disekitar anggota keluarga dapat memicu gejala sesak nafas bagi yang menghirupnya. Apalagi merokok di dalam rumah asap rokok yang bertebaran dimana-dimana dapat membahayakan kesehatan anggota dalam rumah tersebut.

Gambar 4.8

Pengetahuan Rumah Tangga Miskin Merokok Sangat Berbahaya



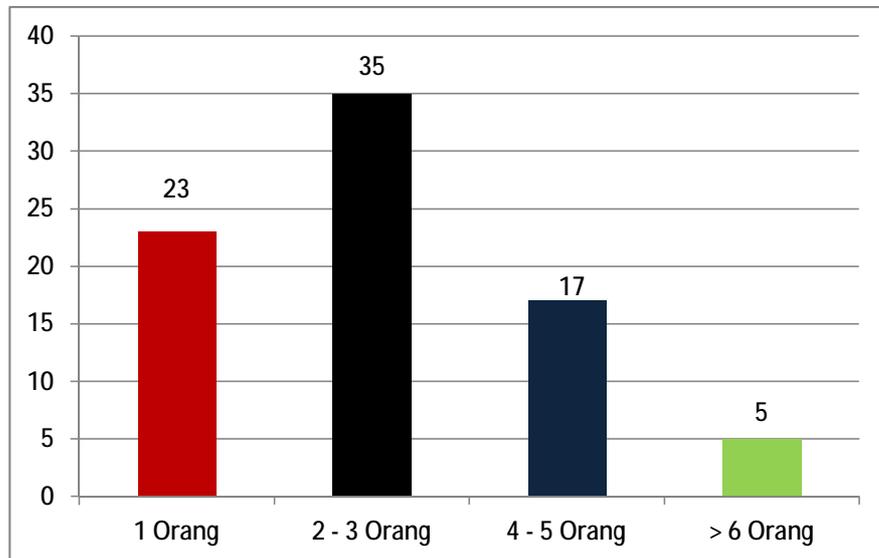
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Pengetahuan kepala rumah tangga miskin tentang bahaya merokok sudah tidak asing lagi untuk di dengar. Meskipun mereka sudah mengetahui bahaya merokok, masyarakat di Kota Medan tetap saja mengkonsumsinya. Alasan mereka pun sangat beragam. Diantaranya sudah kecanduan, dan kalau tidak merokok dalam sehari mulut terasa pahit.

Meskipun kepala keluarga telah mengetahui bahaya merokok mereka tetap saja mengkonsumsinya. Rokok sudah menjadi kebiasaan di dalam rumah tangga miskin pengkonsumsi rokok. Rokok bagi kepala rumah tangga sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari baginya.

Gambar 4.9

Jumlah Anak



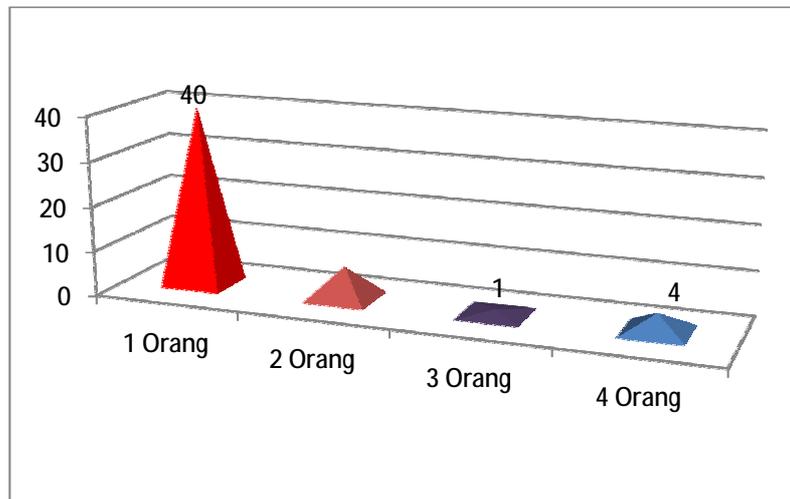
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari diagram diatas, dapat dilihat jumlah anak pada rumah tangga miskin di Kota Medan memiliki jumlah anak yang paling banyak yaitu berjumlah 2-3 orang per rumah tangga atau sebanyak 28% (35 orang) responden, yang kedua paling tinggi yaitu jumlah anak 4-5 orang dengan persentase 18,4% atau sebanyak (23 Orang) responden, dan yang terendah sebesar 6 orang anak dengan persentase 4% atau sebanyak (5 orang).

Jumlah anak yang banyak juga mempengaruhi status gizi anak semakin buruk. Jumlah pendapatan yang cukup digunakan untuk membeli rokok dan sisanya juga untuk memenuhi kubutuhan anak. Status gizi anak juga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari pendapatan kepala rumah tangga.

Gambar 4.10

Jumlah Balita



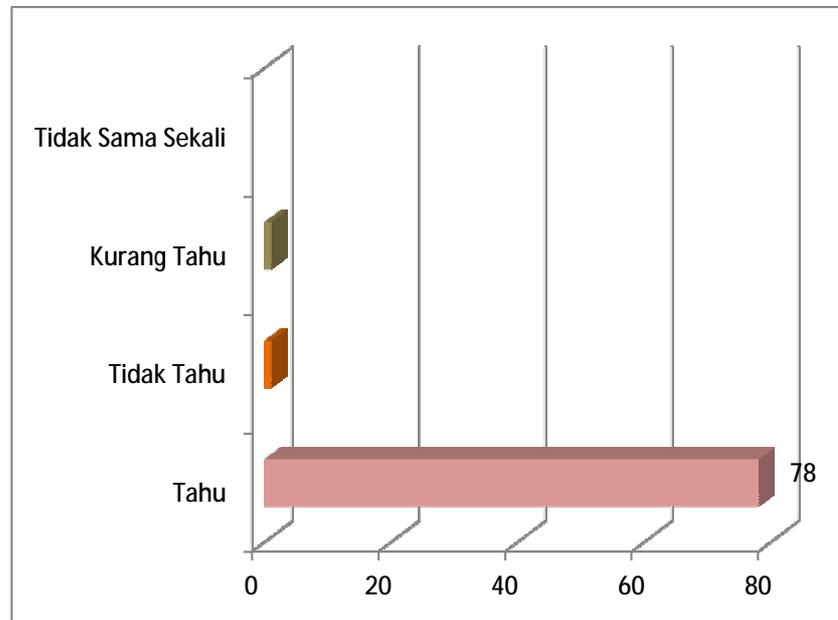
Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah balita di Kota Medan pada rumah tangga miskin yang merokok masih sangat tinggi. Kepala keluarga khususnya bapak kadang lebih mementingkan untuk membeli rokok dari pada untuk kebutuhan gizi anak. Jumlah balita yang tertinggi terletak pada 1 orang anak dengan persentase 32% dengan jumlah responden (40 orang) dan yang terendah terdapat pada 4 orang jumlah balita di kota Medan dengan jumlah responden (3 orang anak) dengan persentase 3,2%.

Jumlah balita juga merupakan masalah besar bagi keluarga miskin pengkonsumsi rokok. Pendapatan yang pas-pasan mengakibatkan status gizi anak tidak terpenuhi. Akibatnya, si balita mengalami kekurangan gizi dan mengakibatkan gizi buruk bagi balita.

Gambar 4.11

Ibu yang Mengetahui Bapak Merokok

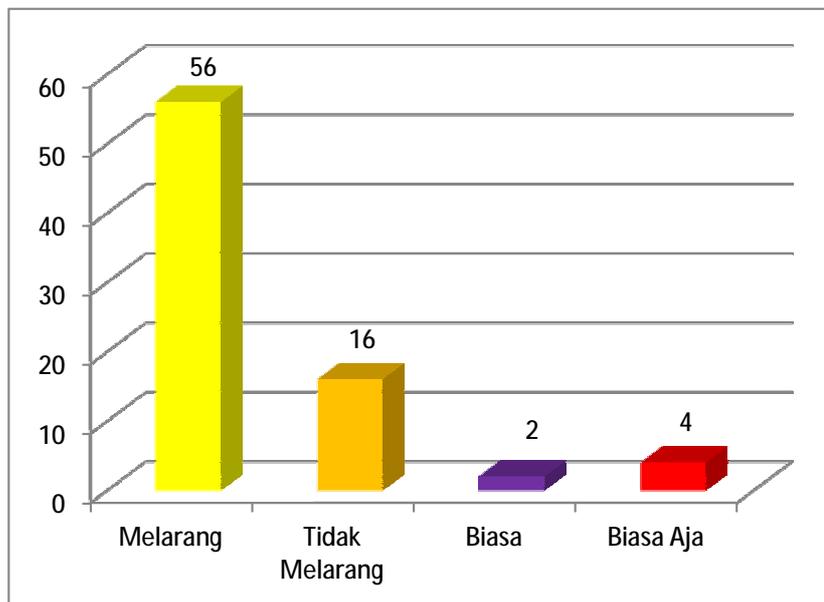


Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Banyak Ibu yang mengetahui bahwa suaminya merokok baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Persentase ibu yang mengetahui jumlah bapak yang merokok sebanyak 62,4% atau (78 Orang) responden yang mengetahuinya. Sedangkan yang tidak mengetahui bapak merokok hanya sekitar 1 orang (0,8%) saja.

Pengetahuan tentang rokok sudah menjadi hal yang biasa di dengar. Merokok merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan darah tinggi bahkan jika mengkonsumsi rokok secara berlebihan, dapat memberi kematian bagi yang mengkonsumsinya.

Gambar 4.12
Alasan Ibu Melarang Bapak Merokok

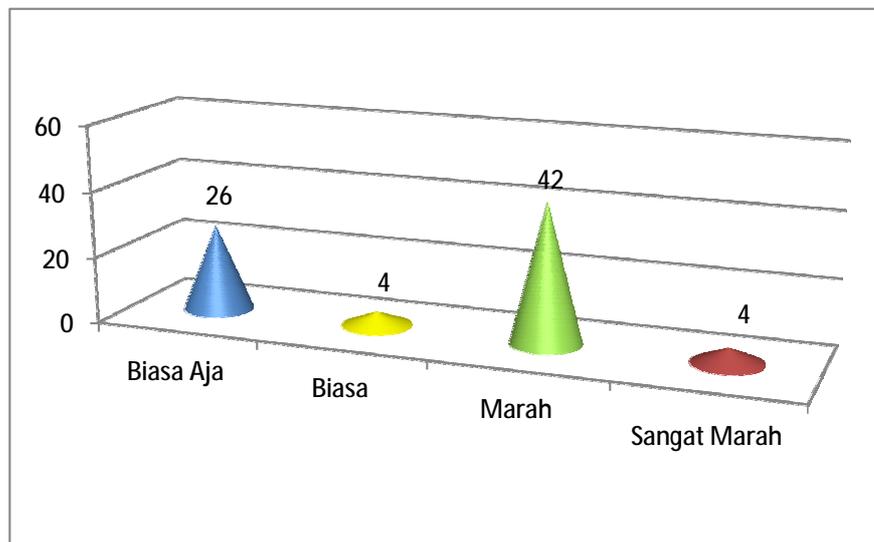


Sumber: Diperoleh dari Data kuisisioner

Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Ibu yang melarang Bapak merokok dirumah ada sekitar 44,8% atau (56 orang) responden dan yang tidak melarang bapak merokok dirumah ada sekitar 12,8% atau (16 orang responden). Ibu yang menganggap Bapak merokok dirumah dengan jawaban biasa aja ada sekitar 3,2% atau (4 orang).

Alasan Ibu melarang Bapak merokok di dalam rumah karena tidak baik untuk kesehatan. Selain mengganggu kenyamanan anggota keluarga, merokok juga menyebabkan berbagai jenis penyakit. Selain itu, bagi Bapak yang mengkonsumsi rokok berpendapat bahwa merokok itu bisa dimana saja, tidak memilih tempat untuk merokok, dan bagi yang sudah kecanduan tidak memikirkan kesehatannya lagi melainkan untuk menghilangkan rasa suntuk yang berlebihan.

Gambar 4.13
Tanggapan Ibu Jika Bapak Merokok di Dalam Rumah



Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tanggapan Ibu jika Bapak merokok di dalam rumah Ibu Marah. Jumlah Ibu yang tanggapannya marah sebanyak 33,6% atau (42 Orang), tanggapan Ibu biasa aja jika Bapak merokok di dalam rumah sebanyak 20,8% atau (26 Orang), tanggapan Ibu sangat marah jika Bapak merokok di dalam rumah sebanyak 6,4% atau (8 Orang), dan tanggapan Ibu biasa jika Bapak merokok di dalam rumah sebanyak 3,2% atau (4 orang).

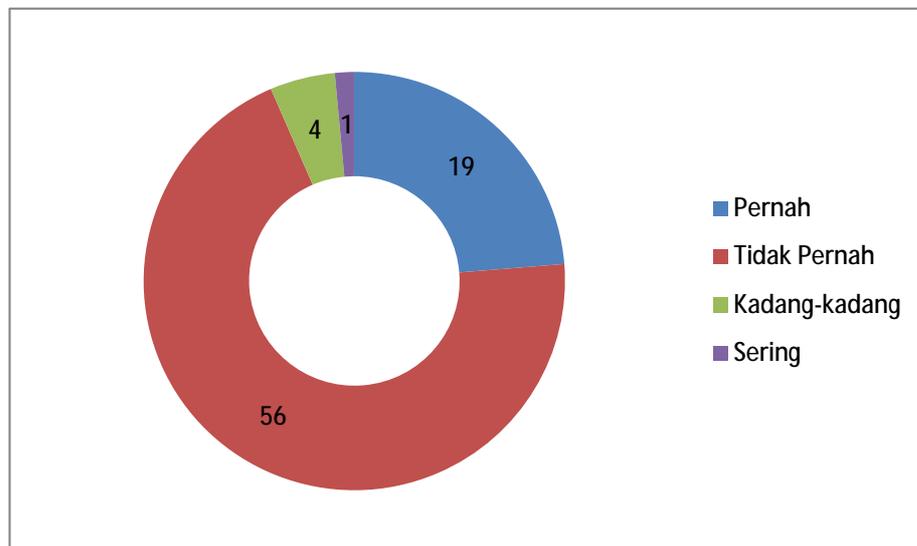
Alasan Ibu marah jika Bapak merokok di dalam rumah karena tidak baik untuk kesehatan diri sendiri dan juga mengganggu kesehatan orang lain. Dalam penelitian saya, anak-anak yang orang tuanya merokok dapat mengalami gejala pernafasan seperti asma sehingga lama kelamaan dibiarkan akan menjadi infeksi saluran pernafasan.

4.3.2 Analisis Tentang Status Gizi Anak Pada Rumah Tangga Miskin Pengkonsumsi Rokok di Kota Medan

Dari data yang diperoleh dengan cara menyebar kuisisioner dapat disimpulkan bahwa status gizi anak yang mengonsumsi rokok di Kota Medan sangat buruk. Karena kebutuhan untuk membeli rokok lebih besar dari pada untuk memenuhi kebutuhan anak.

Gambar 4.14

Pengeluaran Rokok Jika Ditabung Dapat Menambah Kebutuhan Gizi Anak



Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

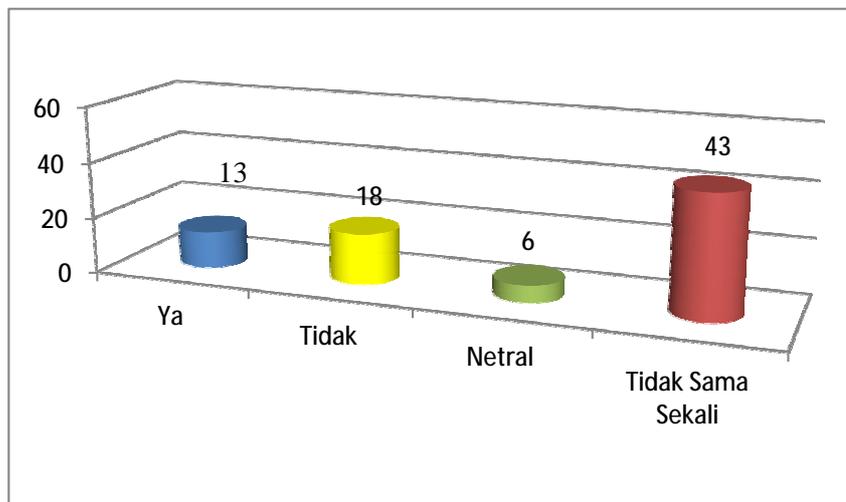
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak masih sangat sedikit. Dari 80 orang responden yang berfikir untuk memenuhi kebutuhan gizi anak hanya (19 orang) responden saja atau 15,2%, yang tidak pernah berfikir bahwa pengeluaran rokok jika ditabung dapat memenuhi kebutuhan gizi anak sekitar 44,8% atau (56 orang).

Alasan mereka tidak berfikir sampai kesana karena mereka hanya memikirkan pengeluaran untuk hari ini dan untuk besok dipikirkan dihari yang akan datang. Menurut penelitian yang saya sebar melalui kuisisioner mereka lebih

mengutamakan mengkonsumsi rokok daripada untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

Gambar 4.15

Pengeluaran Rokok Dapat Mengurangi Kebutuhan Anak



Sumber: Diperoleh dari Data Kuisisioner

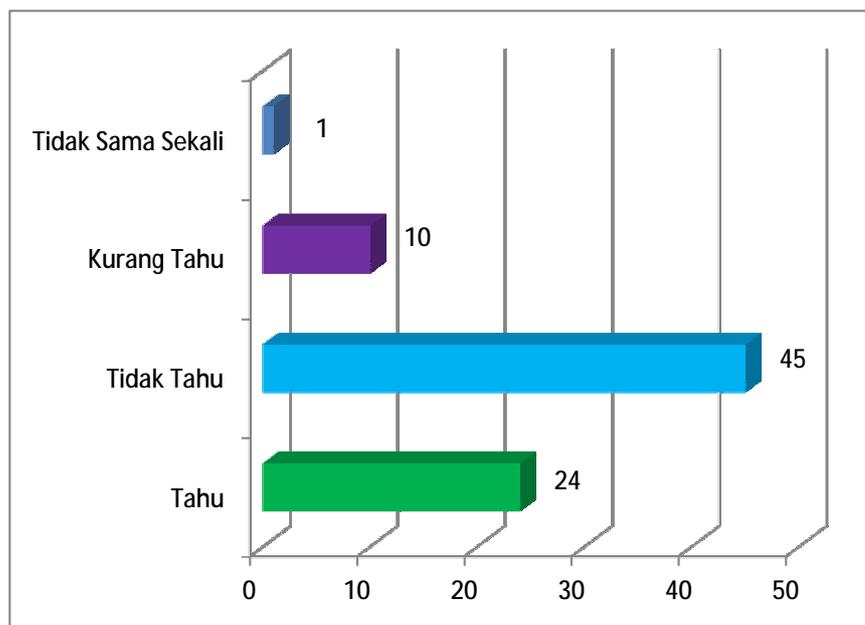
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran rokok dapat mengurangi kebutuhan gizi anak. Diperoleh dari data kuisisioner yang saya sebar, jumlah bapak yang menjawab pengeluaran rokok tidak sama sekali mengurangi kebutuhan anak sebanyak 34,4% atau (43 orang), jumlah bapak yang menjawab pengeluaran rokok tidak mengurangi kebutuhan anak sebanyak 14,4% atau (18 orang), jumlah bapak yang menjawab pengeluaran rokok iya mengurangi kebutuhan anak sebanyak 10,4% atau (13 orang), dan jumlah bapak yang menjawab netral pengeluaran rokok dapat mengurangi kebutuhan anak sebanyak 4,8% atau (6 orang).

Alasan Kepala keluarga lebih mementingkan untuk membeli rokok daripada untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan berkurangnya asupan gizi anak dampaknya secara langsung mempengaruhi pertumbuhan anak. Tanpa

asupan gizi yang ideal anak beresiko pertumbuhannya lebih lambat dari pada pertumbuhan anak pada umumnya.

Gambar 4.16

Penyebab Asap Rokok Mempengaruhi Perkembangan Fisik Anak

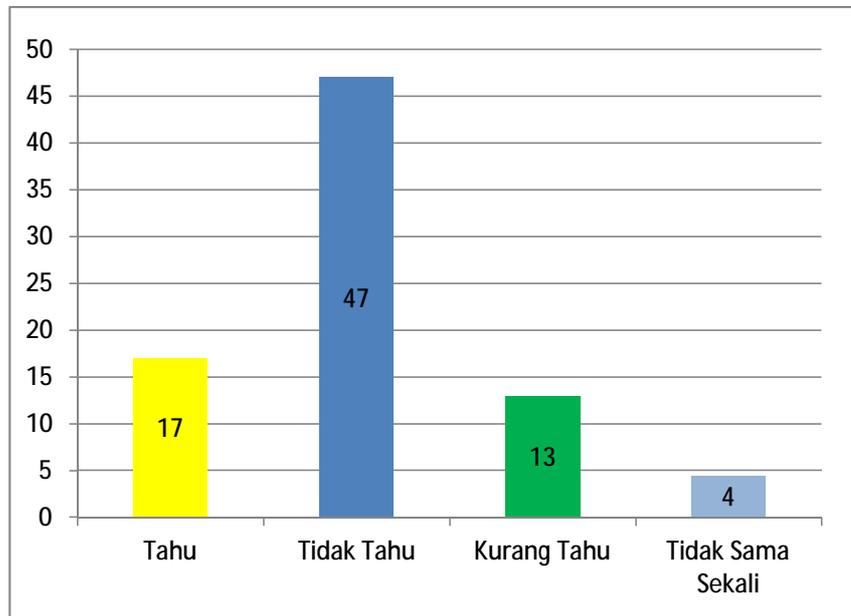


Sumber: diperoleh dari data kuisioner

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa banyak kepala keluarga yang tidak tahu bahwa asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Diperoleh dari hasil kuisioner rumah tangga miskin pengkonsumsi rokok yang tidak tahu bahwa asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak sebanyak 45 orang responden atau (36%), kepala keluarga yang tahu bahwa asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak ada sebanyak 24 orang responden atau (19,2%), kepala keluarga yang kurang tahu bahwa asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak sebanyak 10 orang responden atau (8%), dan kepala keluarga yang tidak tahu sama sekali tentang bahaya asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak ada sebanyak 1 orang responden.

Gambar 4.17

Asap Rokok Mempengaruhi Nafsu Makan Anak



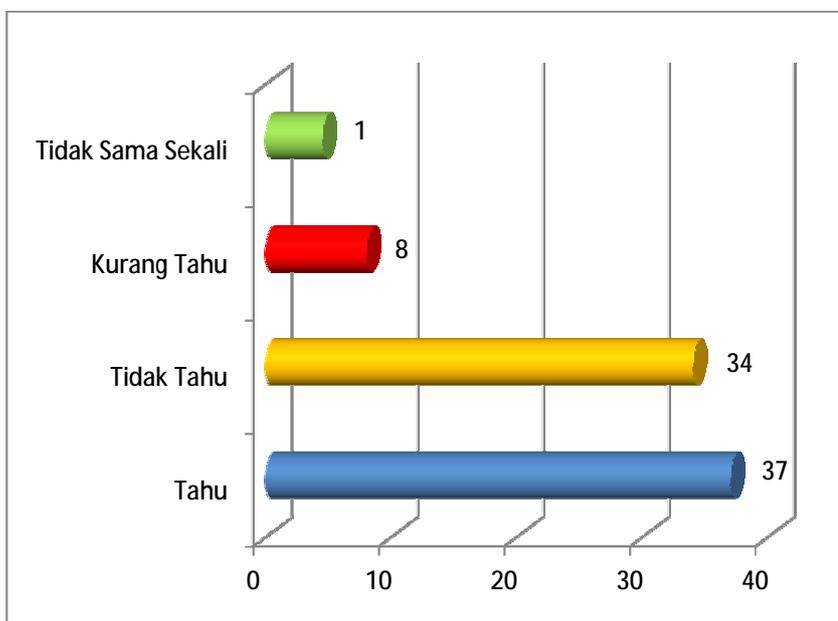
Sumber: diperoleh dari data kuisisioner

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa banyak kepala keluarga yang tidak mengetahui bahwa asap rokok dapat mempengaruhi nafsu makan anak. Diperoleh dari hasil kuisisioner, jumlah kepala keluarga yang tidak mengetahui bahwa asap rokok dapat mempengaruhi nafsu makan anak sebanyak 47 orang responden atau (37,6%), jumlah kepala keluarga yang mengetahui bahwa asap rokok dapat mempengaruhi nafsu makan anak sebanyak 17 orang responden atau (13,6%), jumlah kepala keluarga yang kurang tahu bahwa asap rokok dapat mempengaruhi nafsu makan anak sebanyak 13 orang responden atau (10,4%), dan jumlah bapak yang tidak tahu sama sekali bahwa asap rokok dapat mempengaruhi nafsu makan anak sebanyak 3 orang responden atau (2,4%).

Alasan mereka tidak mengetahuinya karena tidak pernah berfikir kalau asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Selain itu, peran Ibu juga banyak yang mendukung bahwa bapak bisa merokok di dalam rumah.

Gambar 4.18

Perokok Pasif Untuk Anak – Anak Akan Berdampak Kematian Jika Berlangsung Cukup Lama



Sumber: diperoleh dari data kuisioner

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa banyak kepala keluarga yang mengetahui jika anak-anak sering menghirup asap rokok dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian. Jumlah kepala keluarga yang tahu bahwa perokok pasif untuk anak-anak akan berdampak kematian jika berlangsung cukup lama sebanyak 37 orang responden atau (29,6%), jumlah kepala keluarga yang tidak tahu bahwa perokok pasif untuk anak-anak akan berdampak kematian jika berlangsung cukup lama sebanyak 34 orang responden atau (27,2%), jumlah kepala keluarga yang kurang tahu bahwa perokok pasif untuk anak-anak akan berdampak kematian jika berlangsung cukup lama sebanyak 8 orang responden atau (6,4%), dan jumlah kepala keluarga yang tidak tahu sama sekali bahwa perokok pasif untuk anak-anak akan berdampak kematian jika berlangsung cukup lama sebanyak 1 orang responden

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Rumah tangga miskin yang mengkonsumsi rokok memiliki hubungan dengan status gizi anak. Penelitian ini dilakukan terhadap 80 rumah tangga miskin mengkonsumsi rokok. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menyebar kuisioner. Dari kuisioner diketahui bahwa benar pengeluaran kepala rumah tangga lebih besar untuk membeli rokok dari pada untuk memenuhi gizi anak.
2. Rumah tangga miskin yang mengkonsumsi rokok dengan status gizi anak memiliki hubungan dengan pendapatan masyarakat. Banyak rumah tangga miskin yang lebih mengutamakan untuk membeli rokok daripada untuk memenuhi status gizi anak. Karena bagi mereka yang sudah kecanduan merokok, berpendapat bahwa merokok itu tidak bisa di hentikan dengan cara mudah. Perokok aktif juga mengetahui bahaya merokok yaitu dapat menyebabkan kanker paru dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kematian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapat, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

1. Status gizi anak sangat perlu diperhatikan oleh keluarga terutama ayah dan ibu. Untuk dapat memenuhi status gizi anak ada baiknya jika uang untuk membeli rokok ditabung saja untuk menambahi uang belanja. Jika anak kekurangan gizi sejak kecil, maka besar kemungkinan anak dengan mudahnya terkena penyakit.
2. Kepala keluarga harus lebih memperhatikan ketepatan sasaran dalam pemberian gizi anak terutama rumah tangga yang memiliki Balita. Karena banyak masyarakat yang hidupnya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan Bapak juga harus betul-betul memperhatikan kualitas makanan anak. Oleh sebab itu ada baiknya jika Bapak berhenti merokok dan uang rokok digunakan untuk menambah uang belanja dalam memenuhi gizi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, 2012. *Masalah Kemiskinan Dan Kejahatan Serta Respon Kebijakan Publik Dalam Rangka Mengatasinya*. Journal
- Amstrong, Sue. 1991. *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan*. Jakarta: Arcan
- Badan pusat Statistik (BPS)- Bpk.go.id / Pengeluaran Konsumsi non konsumsi (online)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Bpk.go.id / Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (online)
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: cetakan BPFE
- Bridgman dan Davis dalam Suharto. 2007. *Pengertian Kebijakan Publik* <http://scholar.google.com>. Di akses pada rabu, 12 desember 2018
- Chainiango dan Mudjiharjo, 1995. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: CV. Rosa
- Dani dan Roswita. 2015. *Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dumairi. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Depkes, 2007, *Status Gizi Anak* (online) Di akses pada kamis,13 Desember 2018
- Hartomo & Aziz, 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ifandari, 2015. *Hubungan Perilaku Merokok denfan indeks masa tubuh remaja putra*, E-Jurnal
- Janarsy, Owin. 2004. *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika. Jakarta. 2004
- Jhingan, M 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, mudrajat (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Moh Nazir. 2005 *Op. Cit.* Halaman 54

- Soenarno, 2002. *Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Teknik Pengumpulan Data*. Halaman 199
- Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Bina Aksara. Jakarta. Halaman 91
- Suharto, Edi 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1997. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi 2 Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Janarsy.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Syafruddin. 2009. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media
- Todaro, P. Michael 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta: jl. H. Baping Raya No.100
- WHO dalam Toukan 2016. *Besarnya Konsumsi Rokok*. Halaman 61
- www.bps.go.id tentang kemiskinan di Indonesia.